

KIK
Per 75/01
Mut
6

SKRIPSI

RAHNIAN MUTIARAM

**BADAN ARBITRASE MUAMALAT ISLAM (BAMUI) SEBAGAI
ARBITRASE ISLAM DAN KEWENANGANNYA DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARI'AH**



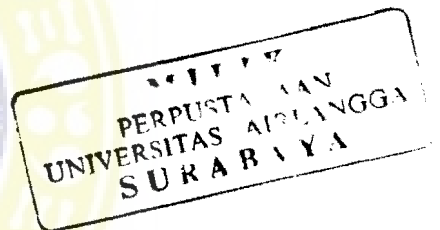
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

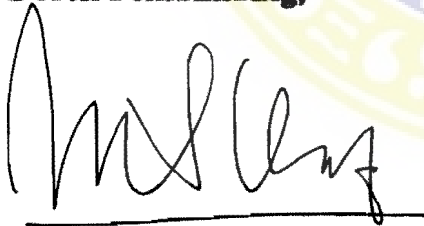
**BADAN ARBITRASE MUAMALAT ISLAM (BAMUD) SEBAGAI
ARBITRASE ISLAM DAN KEWENANGANNYA DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARI'AH**

SKRIPSI

**DIAJUKAN SEBAGAI PENULISAN AKHIR UNTUK MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM**



Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, belonging to Hj. Moerdiati, S.H., M.S.

Hj. Moerdiati, S.H., M.S.

Penyusun,

A handwritten signature in black ink, belonging to Rahnian Mutiaram.

**Rahnian Mutiaram
NIM. 039614452**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

B A B IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Arbitrase menurut Islam adalah sebagai suatu sarana penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh **hakam** (arbiter) yang dipilih atau ditunjuk secara sukarela oleh kedua belah pihak yang bersengketa untuk mengakhiri sengketa antara mereka, dan kedua belah pihak akan mentaati penyelesaian sengketa oleh hakam atau para hakam yang mereka tunjuk itu. Persamaannya dengan Arbitrase Konvensional adalah sama – sama Lembaga Penyelesaian sengketa di luar peradilan. Selain itu mengenai prosedur juga sebagian besar memuat ketentuan yang sama, hanya saja dalam Arbitrase Islam (BAMUI) dikenal adanya penyelesaian sengketa dengan **“Prodeo”**.⁴¹ Selain itu dalam BAMUI penunjukan arbiter dilakukan oleh Ketua BAMUI.
- b. Kewenangan BAMUI menurut anggaran dasarnya adalah menyelesaikan sengketa – sengketa perbankan, industri, jasa yang dalam operasinya berkaitan dengan prinsip syari’at. Juga memberikan saran walaupun tidak terjadi sengketa. BAMUI tidak berwenang apa yang dilarang dalam Rv. Kewenangan BAMUI hanya

⁴¹ Peraturan Prosedur BAMUI ps. 5 ayat (6).

ada jika dalam perjanjian kedua belah pihak mencantumkan klausula yang menyebutkan bahwa sengketa akan diselesaikan oleh BAMUI. Apakah itu dengan *pactum de compromittendo* ataukah dengan akta kompromis. Prosedur dalam BAMUI sebagian besar hampir sama dengan prosedur arbitrase pada umumnya. Salah satu kendala dalam putusan BAMUI, walaupun itu dianggap biasa oleh pihak BAMUI yaitu tentang dualisme sengketa, artinya dalam BAMUI suatu sengketa yang sudah diputus oleh BAMUI karena suatu alasan dapat juga diajukan pada Pengadilan Negeri. Hal ini perlu mendapat perhatian dari praktisi hukum dan pebisnis.

2. Saran

- a. Arbitrase Islam memang hal yang baru di Indonesia. Akan tetapi karena hal tersebut dirasa belum lazim di Indonesia maka perlu diadakannya sosialisai pemasyarakatan secara intensif. Untuk lebih mempopulerkan dan mensosialisasikan arbitrase sebagai suatu penyelesaian sengketa perdata, diperlukan upaya – upaya antara lain melalui seminar, simposium, atau “workshop” tentang arbitrase. Hal ini ditujukan antara lain agar masyarakat, khususnya kalangan bisnis dan perdagangan lebih terbuka pemahamannya serta lebih terpacu untuk memanfaatkan lembaga arbitrase dalam menyelesaikan sengketa mereka. Terlebih lagi untuk para praktisi

hukum yang mendampingi klien mereka dalam sengketa yang diselesaikan secara arbitrase. Meskipun BAMUI merupakan globalisasi.

- b. Dualisme yang berkaitan dengan kewenangan BAMUI dalam penyelesaian sengketa perbankan perlu mendapatkan perhatian yang serius. Pihak BAMUI sendiri menyadari hal tersebut dan berharap agar dibentuknya UU baru yang mengatur arbitrase Islam atau paling tidak UU 30 tahun 1999 direvisi sehingga ada pasal yang mengatur tentang arbitrase Islam. Seperti juga UU no. 7 tahun 1992 yang direvisi dengan UU no. 10 tahun 1998 yang pasalnya telah mengatur tentang perbankan syari'ah.